

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN CASH TOWARD  
ACCRUAL DENGAN ACCRUAL BASIS DALAM PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : RIZQA WALIDAIN HARAHAHAP.  
NPM : 1505170701  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Pada Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : RIZQA WALIDAIN HARAHAP  
N P M : 1505170701  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN CASB TOWARD ACCRUAL DENGAN ACCRUAL BASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZQA WALIDAIN HARAHAP

N.P.M : 1505170701

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN CASH  
TOWORD ACCRUAL (CTA) DENGAN ACCRUAL  
BASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Januari 2019

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQA WALIDAIN HARAHAP  
NPM : 1505170701  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Pemerintah Kota Medan**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Januari 2019  
Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

22385AFF570299990



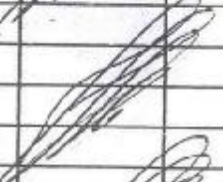

6000  
ENAM RIBU RUPAH

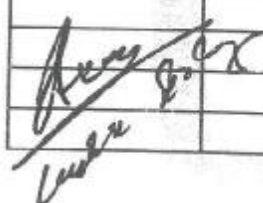


RIZQA WALIDAIN HARAHAP

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RIZQA WALIDAIN HARAHAP  
N.P.M : 1505170701  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN CASI TOWORD ACCRUAL (CTA) DENGAN ACCRUAL BASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07 Jan 2019	Koordinasi berkenaan dengan hasil penelitian dan pembahasan		
10 Jan 2019	perbaiki hasil pembahasan dan penelitian - perbaiki kesimpulan dan saran		
11 Jan 2019	- Selesaikan hasil dan pembahasan - Selesaikan Kesimpulan dan Saran		
24 Jan 2019	- Lengkapi abstrak		



Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Medan, Januari 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**RIZQA WALIDAIN HARAHAHAP. NPM. 1505170701. Analisis Perbandingan Penerapan *Cash Toward Accrual* Dengan *Accrual Basis* Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019**

*Cash Toward Accrual* merupakan proses transisi dalam penerapan menuju *Accrual basis*. Sulitnya memahami kebijakan akuntansi yang terus berubah, dan sistem akuntansi yang cukup kompleks, maka diperlukan sumber daya manusia yang senantiasa cukup paham dengan *Accrual basis* di dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kota Medan. Sekaligus dapat mengetahui bentuk perbedaan dari *Cash Toward Accrual* maupun *Accrual basis*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penulis berpedoman pada konsep-konsep secara tertulis yang dikemukakan dalam bentuk tulisan salah satunya seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung dengan metode wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan fokus penelitian pada segi pengakuan, pencatatan dan pelaporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada CTA dan *Accrual basis* memiliki perbedaan pada laporan keuangan yang disajikan, seperti pada CTA terdapat 6 (enam) komponen laporan keuangan, empat diantaranya yang wajib dalam penggunaannya adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan dalam *Accrual basis* terdapat 7 (tujuh) komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang menggunakan basis CTA diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan pada laporan keuangan yang menggunakan *Accrual basis* diakui pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan kas diterima atau dikeluarkan serta mencatat seluruh sumber daya yang ada.

**Kata Kunci : *Cash Toward Accrual*, *Accrual basis*, Penyajian Laporan Keuangan**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Penerapan Cash Toward Accrual Dengan Accrual Basis Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan**”. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda saya tercinta **Abdussaiman Harahap**, dan Ibunda saya tercinta **Chairani Nasution**, serta Paman saya tecinta **Chairul Ihsan Nasution** dan **Keluarga terdekat** atas kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa yang begitu besar kepada penulis. Atas bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan, petunjuk, nasehat, dan kerjasama dari berbagai pihak, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih, yaitu kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, S.E., M.M , M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si** selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing saya yang luar biasa yang senantiasa telah membimbing dan memberikan banyak motivasi serta berbagi ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Bapak **Sanusi Harahap, S.sos** selaku KABID Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Bapak **Risuhendi, S.E., M.Si., AK., CA** selaku KASUBID Pengelolaan Data dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang telah bersedia meluangkan waaktu dalam berbagi ilmu pengetahuannya dengan sabar kepada Penulis.



10. Bapak **Darman Silalahi** selaku staff pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah bersedia berbagi ilmu pengetahuannya dengan sabar dan menyediakan data penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. **Pemerintah Kota Medan** yang menjadi objek penelitian penulis dan seluruh staf Bidang Akuntansi BPKAD Kota Medan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Seluruh teman-teman **PK IMM FEB UMSU** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan **Kelas Akuntansi C-Siang** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman **Konsetrasi Keuangan** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Sahabat tercinta **Siti Herlina, Ngkasah Kinin Duma Sinaga, Rindang Arumdari, Ramadhani Parinduri, Lisa Pertiwi, Wahyu Rizqi Widya, Nurlela Anggriani Siahaan, Ismi Tri Wulandari, Atika Ramadani, Ayu Ramadani Harahap, Lely Handayani, Afini Febriani** yang telah memberikan dukungan dan motivasi penuh kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Tidak ada sesuatupun yang dapat penulis berikan sebagai imbalan kecuali untaian doa, “Semoga amal baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT”. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 16 Januari 2019

**RIZQA WALIDAIN HARAHAP**  
**NPM 1505170701**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah daerah.....	9
b. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2. Penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	12

3. Cash Toward Accrual /Kas Menuju Akrua.....	22
4. Accrual basis/ Basis Akrua .....	25
5. Penelitian Terdahulu .....	28
B. Kerangka Berfikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	31
B. Definisi Operasional .....	32
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel III-1 Waktu Penelitian .....	34
Tabel III-2 Tabulasi Wawancara .....	36
Tabel IV-1 Laporan Realisasi Anggaran .....	39
Tabel IV-2 Neraca.....	41
Tabel IV-3 Laporan Arus Kas.....	43
Tabel IV-4 Laporan Realisasi Anggaran .....	46
Tabel IV-5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	48
Tabel IV- 6 Neraca.....	49
Tabel IV-7 Laporan Operasional .....	50
Tabel IV-8 Laporan Arus Kas.....	52
Tabel IV-9 Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
Tabel IV-10 Jurnal Umum .....	59
Tabel IV-11 Jurnal Korolari.....	59
Tabel IV-12 Perbedaan CTA dengan Accrual basis .....	60

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam era reformasi ini disetiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good governance* termasuk di Indonesia. Kepemerintahan yang baik adalah tujuan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkannya, salah satunya dalam bidang keuangan pemerintahan. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Kebutuhan standar akuntansi khususnya sektor publik terus berkembang, hal yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Menurut Mardiasmo (2012) sektor publik merupakan manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga dalam pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintah atau yang selanjutnya disingkat SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

(Permendagri 64 Tahun 2013). Standar akuntansi pemerintah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sesuai dengan amanat Undang-undang No.17 tahun 2003. Sebelum menerapkan basis akrual, pemerintah menggunakan *cash basis* dalam penyusunan laporan keuangannya. Dimana dalam pencatatannya masih menggunakan *single entry* dan masih banyak kekurangan di dalam penerapannya. Untuk itu Pemerintah mencanangkan kebijakan *Cash Toward Accrual* (CTA) yang merupakan transisi dan pendekatan yang unik yang dikembangkan oleh Indonesia dalam penyajian laporan keuangan sebelum diberlakukan secara penuh *Accrual basis*.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah menganut akuntansi berbasis kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA). Penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA, pemerintah daerah sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Pemerintah Daerah juga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik dan telah cukup baik menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

Ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi CTA. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas. Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyesihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan



lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU No. 17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan berbasis CTA juga kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.

Tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga internasional, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *the International Monetary Fund (IMF)*, dan *World Bank*, untuk menerapkan basis akrual kepada negara-negara di dunia menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya (Halim, 2012). Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama

masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga Tahun 2014. Dengan kata lain lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Perubahan yang nyata dari peraturan pemerintah tersebut yaitu diwajibkannya akuntansi berbasis akrual, yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual atau CTA.

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Kemenkeu (2014) dalam modulnya menyebutkan bahwa basis kas menuju akrual merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan laporan keuangan pokok yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005).

Basis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Study Nomor 14 IFAC Public Sector Committee (2003) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Perubahan

basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual pada sektor pemerintahan dipandang sebagai bagian dari agenda *New Public Management* yang dirancang untuk mencapai kondisi operasi yang lebih menyerupai bisnis dan kinerja yang berfokus pada sektor publik.

Basis Akrual menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 01 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif.

Laporan Keuangan Pemerintahan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan dalam satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya melalui Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu entitas yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak awal tahun 2015 dan sebelum itu menerapkan *Cash Toward Accrual*. Pemerintah Kota Medan menerapkan basis akrual yaitu pada laporan *financial* dan basis kas pada Laporan *budgetary* (anggaran). Proses penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Publik yang telah disusun oleh KSAP.

Pemerintah Kota Medan telah berusaha untuk menerapkan basis akrual dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala seperti sulitnya memahami kebijakan-kebijakan akuntansi yang terus berubah dan sistem akuntansi yang

cukup komplikasi dalam penerapan basis akrual. Disamping itu tenaga atau sumber daya manusia yang akan melaksanakan atau menjalankan juga terbatas.

Penelitian sebelumnya mengenai Akuntansi akrual di Indonesia masih sangat minim, yaitu diantaranya dilakukan oleh (Kusuma, 2013) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Septia, 2013) yang menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual yaitu sumber daya manusia, informasi teknologi, komitmen organisasi, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk penulisan tugas akhir dan juga bertujuan agar kita semua dapat memahami bagaimana penyajian laporan keuangan pemerintah baik dalam versi CTA maupun dalam *Accrual basis*. Karena tidak mungkin di lakukan perubahan sistem akuntansi dari CTA ke *Accrual basis* kalau tidak karena ada yang ingin di sempurnakan lagi dari penerapan yang sebelumnya.

Maka dari itu Penulis memberi judul penelitian ini “ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN CASH TOWARD ACCRUAL DENGAN ACCRUAL BASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar tercapai suatu pembahasan yang terperinci, maka dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat kendala dalam pelaksanaan *Accrual basis*.
2. Sulitnya pemahaman kebijakan-kebijakan tentang *Accrual basis*.
3. Minimnya sumber daya manusia untuk melaksanakan *Accrual basis*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyajian pelaporan keuangan dengan menggunakan *Cash Toward Accrual (CTA)* pada Pemerintah Kota Medan?
2. Bagaimana penyajian pelaporan keuangan dengan menggunakan *Accrual Basis* pada Pemerintah Kota Medan?
3. Bagaimana perbedaan penerapan antara *CTA* dengan *Accrual Basis* dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kota Medan. Serta dapat mengetahui gambaran dari penerapan versi *CTA* dengan *Accrual basis* terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan referensi bagi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan basis akrual dan menambah wawasan pengetahuan lainnya di bidang akuntansi.

### **2. Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan pemahaman dan kajian yang lebih yaitu dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah serta memberikan informasi yang lebih luas mengenai basis akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di dalam pemerintah.

### **3. Bagi Masyarakat dan Pengguna Laporan Keuangan (DPRD, BPK, Investor, Kreditor, Donatur, Analis Ekonomi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Badan Eksekutif).**

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

###### **a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.

Menurut Mahmesah, (1995) dalam Halim, (2001) menyatakan bahwa “Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Seperti yang dinyatakan dalam PSAP No. 1 Paragraf 9 bahwa laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan

adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat atau daerah

#### **b. Peranan Dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna didalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :



- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas dana
- d. Pendapatan
- e. Belanja
- f. Transfer
- g. Pembiayaan, dan
- h. Arus kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

## **2. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan

seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Governmental accounting Standard Board GASB, (1998) dalam Halim (2006) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

- a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
- b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan

perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi alokasi sumber daya.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002) dalam Aliyah dan Nahar (2012), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1, alenia 49, (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan dan investasi jangka panjang, aset tetap kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas dana. Secara rinci manfaat penyajian laporan keuangan dalam Aliyah dan Nahar (2012) yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil dan lembaga rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah.

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) pendapatan;
- b) belanja;
- c) transfer;
- d) surplus/defisit;
- e) pembiayaan;
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

#### **b. Neraca**

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan, utang, dan ekuitas dana. Di samping itu, seiring dengan tuntutan yang dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, neraca pembuka (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sebab, bila Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) ingin menghasilkan laporan keuangan secara lengkap pada akhir tahun, maka perlu terlebih dahulu disusun neraca pembuka (*opening balance*). Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, maka bukan tidak

mungkin reformasi dalam keuangan daerah menjadi terkesan lamban dan mandul (Halim, 2002).

Sebaliknya, dengan tidak adanya informasi seperti yang dilaporkan dalam neraca akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintah daerah dalam suatu periode tidak tercermin secara penuh, misalnya tidak ada pelaporan mengenai piutang pajak, saldo aktiva persediaan, aktiva dalam konstruksi, kewajiban saat ini untuk menyerahkan (membayar) sejumlah uang atau barang di masa yang akan datang, dan sebagainya.
- b. Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan penggunaan kas dan mengabaikan transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan aset dan utang.
- c. Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan karena tidak menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d. Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas.
- b) investasi jangka pendek.
- c) piutang pajak dan bukan pajak.
- d) persediaan.
- e) investasi jangka panjang.
- f) aset tetap.
- g) kewajiban jangka pendek.
- h) kewajiban jangka panjang.
- i) ekuitas dana.



Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset.
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan.
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
- b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan.
- c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap.
- d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
- e. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya.
- f. Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

### **c. Laporan Arus Kas**

Laporan keuangan berikutnya yang harus disusun oleh pemerintah daerah adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut dari pengertian-pengertian dari aktivitas dimaksud defenisi diatas yaitu:

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi (PSAP BA-03 paragraf 8).
- b. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas (PSAP BA-03 paragraf 27).
- c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang (PSAP BA-03 paragraf 31).
- d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (PSAP BA-03 paragraf 35).

#### **d. Catatan atas Laporan Keuangan.**

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum daerah. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

### **3. Cash Toward Accrual (CTA) / Kas Menuju Akrua**

Menurut Beechy (2007) basis kas menuju akrual mengakui atau mencatat transaksi atau kejadian hanya pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan, sedangkan kewajiban tidak disajikan pada laporan keuangan begitu juga dengan piutang dan aset lainnya. Kahn & Mayes (2009) berpendapat bahwa salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk sukses dalam peralihan ke basis akrual ini adalah sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan. Manfaat basis kas menuju akrual berdasarkan Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 adalah

menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan pengalokasian sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan serta perundang-undangan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Erlina, Omar dan Rasdianto (2015) Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan Basis ini pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 tahun 2005).

SAP berbasis kas menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP berbasis kas menuju akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual

menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP No. 24 Tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas telah diterima atau dibayar.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai pemicu dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan laporan keuangan tahun anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara garis besar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas laporan Keuangan, yang dikenal sebagai basis kas menuju akrual.

#### 4. Accrual Basis / Basis Akrua

Pengertian Akrua Basis akrua adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013), sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah harus menerapkan SAP akuntansi berbasis akrua. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrua dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrua juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua. Didalam wacana akuntansi secara konseptual Accrual basis dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Accrual basis mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar.

*Accrual basis* dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Oleh karena

itu *Accrual basis* merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tudor dan Mutiu, (2006) berpendapat serupa mengenai definisi basis akrual yaitu pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas atau piutang sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa. Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual adalah metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat. Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik pencatatan akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh setiap organisasi termasuk instansi pemerintahan, pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian di akui untuk tujuan laporan keuangan. Menurut Erlina (2015) Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga



publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual”. Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

## 5. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yaitu tentang penyajian laporan keuangan baik dengan CTA maupun Accrual basis. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut dijadikan landasan dan keterbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang diambil adalah sebagai berikut :

**Tabel II-1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Citra Damanik (2011)	Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SAP Pada Pemerintah kota Binjai	Pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan, kemudian pemahaman SAP, dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kendala dalam penerapan SAP di Pemerintah Kota Binjai.
2.	Sampel, Kalangi, dan Runtu, T. (2015).	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas..
3.	Usman, Sunandar, dan Ida Farida (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan akuntansi akrual di Pemerintah masih sangat rendah.

## B. Kerangka Konseptual

Laporan keuangan Pemerintah, disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010). Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Anwar Nasution, 2009).

Laporan keuangan harus disusun disajikan sesuai standar akuntansi yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Peraturan 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional serta mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

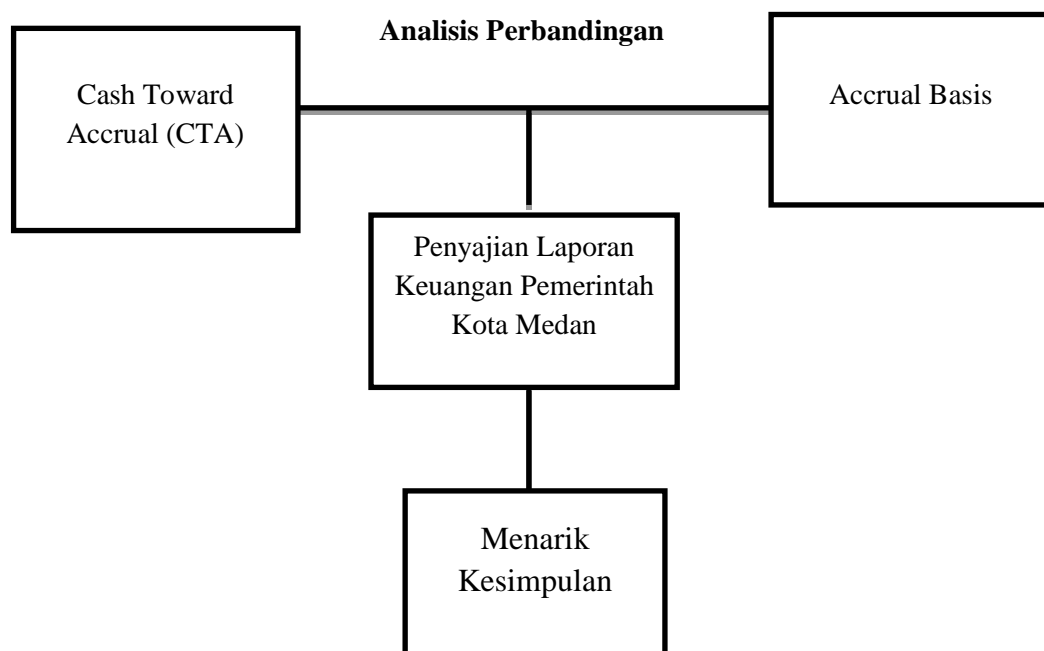
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual dapat dilaksanakan paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010, yang artinya pada tahun 2015 seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (*Accrual Basis*).

Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 01 bahwa Basis akrual atau *accrual basis* adalah “Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar meskipun biaya dan

pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima”. Sementara itu pengertian Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi bukan hanya pada saat kas yang diterima atau dibayar (Abdul Halim, 2007). Dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan proses pencatatan atau pembukuan pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan kas diterima atau di bayarkan hal ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pencatatan.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Medan sudah melaksanakan Accrual Basis yang sebelumnya menggunakan Cash Toward Accrual (CTA). Hal ini menunjukkan adanya konsep yang berbeda sebelum dan sesudah tahun 2015 dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar II.1**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dimaksud dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu proses pemahaman analisis berdasarkan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki suatu situasi tentang fenomena permasalahannya. Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dimaksud dengan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan hubungan konflik dan mekanisme pengelolannya yang telah dan sedang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, tajam, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar objek dan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Pada penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen kunci. Peneliti sudah mempersiapkan bekal teori dan wawasan yang cukup berkaitan dengan persoalan yang diteliti, sehingga bisa dapat dikembangkan secara terarah dan sistematis baik dalam bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang

diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan data.

Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tentang penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan baik dengan menggunakan CTA maupun *Accrual basis*.

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini:

### **a. Cash Toward Accrual**

Yang dimaksud dengan Cash Toward Accrual (CTA) dalam penelitian ini adalah bentuk penyajian laporan keuangan dalam hal pengakuan, pencatatan dan pelaporan.

### **b. Accrual basis / Akrual basis**

Yang dimaksud dengan Accrual basis dalam penelitian ini adalah bentuk penyajian laporan keuangan dalam hal pengakuan, pencatatan dan pelaporan.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pemerintah Kota Medan, yang berlokasi di jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal

yang mendasari pemilihan Kantor Pemerintah Kota Medan sebagai objek penelitian adalah Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu entitas yang telah menerapkan *Accrual basis* yang sebelumnya telah menerapkan *Cash Toward Accrual* dalam penyajian laporan keuangannya. Objek ini juga didasarkan atas pertimbangan yaitu telah memenuhi syarat, terutama dalam hubungan dengan pengumpulan data penelitian

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018		Tahun 2019		
		November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal dan Penelitian					
3	Seminar Proposal					
4	Riset/penelitian Skripsi					
5	Penyusunan Skripsi					
6	Sidang Meja Hijau					

**Tabel III-1 Waktu Penelitian**

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utamanya. Sedangkan data skunder yaitu data yang dikumpulkan melalui tangan orang lain, data sekunder telah tersusun dalam dokumen – dokumen.

1. Data primer berupa jawaban hasil wawancara pada Narasumber yakni Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagai Bidang Penyusun Laporan Keuangan. Data primer ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang tidak dituangkan dalam Laporan Keuangan berhubungan dengan penerapan CTA dan *Accrual basis* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti kendala dan hambatan penerapan *Accrual basis*, dan seterusnya.
2. Data sekunder berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang dalam penyajiannya menggunakan CTA maupun *Accrual basis*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik-teknik berikut, diantaranya:



## 1. Wawancara

Wawancara (Interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari Narasumber dengan cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada Narasumber. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang tidak tertuang dalam Laporan Keuangan mengenai penerapan CTA dengan *Accrual basis*.

Adapun tabulasi teknik wawancara yang dilakukan oleh Peneliti sebagai berikut :

**Tabel III-2 Tabulasi Wawancara**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Jumlah</b>
Cash Toward Accrual (CTA)	- Pengakuan	1-5
	- Pencatatan	6-9
	- Pelaporan	10-12
Accrual basis	- Pengakuan	13-18
	- Pencatatan	19-22
	- Pelaporan	23-25

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dengan teknik ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kota Medan baik dengan menggunakan CTA maupun Accrual basis yaitu berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

## **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis ini adalah sebagai berikut :

### **1. Mengumpulkan Data**

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah awal dan paling utama dalam proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Peneliti pertama sekali mengumpulkan data-data yang memfokuskan pada proses penelitian baik yang berhubungan dengan CTA maupun *Accrual basis*.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka Peneliti melakukan reduksi data untuk memilah data-data yang akan difokuskan pada penelitian ini.

## 3. Mendeskripsikan basis CTA dengan *Accrual basis*.

Peneliti mendeskripsikan variabel-variabel yaitu tentang *Cash Toward Accrual (CTA)* dengan *Accrual basis*.

## 4. Menganalisis Laporan Keuangan dengan menggunakan CTA dan *Accrual basis* yaitu berkenaan dengan pengakuan, pencatatan dan pelaporan.

## 5. Melakukan perbandingan antara penyajian laporan keuangan yang menggunakan CTA dengan *Accrual basis*.

## 6. Membuat Kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dinyatakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Medan. Pada Pemerintah Kota Medan, laporan keuangan *Cash Toward Accrual* (CTA) terakhir digunakan pada tahun 2014 sebelum laporan *Accrual basis* diterapkan. *Cash Toward Accrual* (CTA) merupakan basis yang hanya berfokus pada sumber daya berupa kas, baik pada saat kas diterima/dikeluarkan. Disamping penyajiannya sederhana dan mudah dipahami, CTA memiliki berbagai kelemahan seperti tidak menyajikan aset dan kewajiban sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak relevan. Dalam CTA terdapat dua jenis komponen laporan keuangan, yaitu laporan keuangan pokok dan laporan yang bersifat optional. Laporan pokok terdiri atas 4 (empat) komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan yang bersifat optional terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan hanya menyajikan laporan pokoknya saja. Berikut disajikan masing-masing laporan keuangan yaitu :

## 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 dan 2013 yaitu :

**Tabel IV-1 Laporan Realisasi Anggaran**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  
2014 DAN 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(% )	REALISASI
	2014	2014		2013
<b>PENDAPATAN</b>	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63	3.276.344.285.159,73
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.678.116.623.125,00	1.384.246.114.729,62	82,49	1.206.169.709.147,73
Pendapatan Pajak Daerah	1.167.399.279.770,00	962.728.267.172,53	82,47	881.346.719.012,01
Peendapatan Retribusi Daerah	273.992.900.000,00	171.006.302.216,00	62,41	188.459.795.126,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.823.791.825,00	5.705.018.825,00	83,60	9.503.605.764,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.900.651.530,00	244.806.526.516,09	106,48	126.859.589.245,22
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.881.185.547.418,87	2.657.869.713.502,00	92,25	2.060.845.776.012,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.691.495.158.660,00	1.598.113.512.931,00	94,48	1.506.316.349.586,00
Dana Bagi Hasil Pajak	221.252.388.805,00	146.798.093.693,00	66,35	172.440.053.470,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.628.599.855,00	2.228.646.238,00	84,78	1.614.584.116,00
Dana Alokasi Umum	1.393.504.580.000,00	1.393.504.580.000,00	100,00	1.270.244.794.000,00
Dana Alokasi Khusus	74.109.590.000,00	55.582.193.000,00	75,00	62.016.918.000,00
Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	401.536.937.000,00	364.744.140.000,00	90,84	363.758.805.000,00
Dana Penyesuaian	401.536.937.000,00	364.744.140.000,00	90,84	363.758.805.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	788.153.451.758,87	695.012.060.571,00	88,18	190.770.621.426,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	787.847.585.421,87	694.490.156.447,00	88,15	190.770.621.426,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	305.866.337,00	521.904.124,00	170,63	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	1.110.359.000,00	0,00	0,00	9.328.800.000,00
Pendapatan Lainnya	1.110.359.000,00	0,00	0,00	9.328.800.000,00
<b>BELANJA</b>	4.625.169.942.881,00	3.723.643.299.085,60	80,51	3.224.449.048.408,88
<b>BELANJA OPERASI</b>	3.579.613.342.151,00	2.939.241.615.113,97	82,11	2.593.084.833.763,88
Belanja Pegawai	2.401.064.233.215,00	2.049.029.168.377,00	85,34	1.912.221.528.149,00
Belanja Barang	1.088.867.521.486,00	851.348.898.697,83	78,19	644.025.941.486,33
Belanja Bunga	9.000.000.000,00	1.424.780.450,14	15,83	4.993.144.103,55
Belanja Hibah	69.514.920.450,00	35.738.893.607,00	51,41	29.935.455.125,00
Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	533.736.000,00	5,34	742.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.166.667.000,00	1.166.137.982,00	99,95	1.166.264.900,00

### Lanjutan Tabel IV-1 Laporan Realisasi Anggaran

<b>BELANJA MODAL</b>	1.038.556.600.730,00	783.883.177.721,63	75,48	630.802.958.785,00
Belanja Tanah	95.186.969.454,00	43.171.269.654,00	45,35	8.494.139.667,00
Belanja Peralatan dan Mesin	187.140.918.219,00	115.107.207.872,63	61,51	99.416.886.349,00
Belanja Bangunan dan Gedung	221.263.857.803,00	158.665.997.192,00	71,71	207.509.235.619,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	499.447.191.104,00	458.153.424.264,00	91,73	312.285.027.580,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	35.517.664.150,00	8.785.278.739,00	24,73	3.097.669.570,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.000.000.000,00	518.506.250,00	7,41	561.255.860,00
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	518.506.250,00	7,41	561.255.860,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(64.757.413.337,13)	318.472.529.146,02	(491,79)	51.895.236.750,85
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	91.011.413.337,13	73.033.060.944,24	80,25	33.838.947.039,68
Pengguna Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	59.011.413.337,13	73.033.060.944,24	123,76	22.504.947.039,68
Penerimaan Pinjaman Daerah	32.000.000.000,00	0,00	0,00	11.334.000.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	26.254.000.000,00	20.784.820.138,71	79,17	12.701.122.846,29
Pentertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	21.254.000.000,00	20.784.820.138,71	97,79	12.701.122.846,29
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	64.757.413.337,13	52.248.240.805,53	80,68	21.137.824.193,39
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	370.720.769.951,55	0,00	73.033.060.944,24

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 dan 2013 yaitu :

Tabel IV-2 Neraca

NERACA  
PEMERINTAH KOTA MEDAN  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	2014	2013
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	330.769.257.494,47	59.008.116.575,13
Kas di Bendahara Penerimaan	52.495.438,90	255.934.075,48
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Swadana	39.950.991.297,14	12.711.215.458,89
Kas di Bendahara Swakelola	521.159,94	1.313.728.910,22
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	410.381.083.566,73	300.948.870.595,22
Piutang Retribusi	6.878.226.985,00	37.964.200.997,32
Piutang Dana Bagi Hasil	696.353.184.000,55	930.393.776.327,23
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Piutang Lain-lain	42.924.543.583,52	5.079.530.670,95
Persediaan	62.212.467.421,16	47.748.112.714,85
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.589.522.770.947,41</b>	<b>1.395.423.486.325,29</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	1.680.036.374,00
<b>JUMLAH investasi Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.036.374,00</b>
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	322.422.696.455,53	273.559.929.086,00
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>322.422.696.455,53</b>	<b>273.559.929.086,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>322.422.696.455,53</b>	<b>275.239.965.460,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	18.362.283.469.592,00	18.587.731.635.649,00
Peralatan dan Mesin	946.311.516.773,18	837.290.920.429,72
Gedung dan Bangunan	1.145.161.931.895,34	1.037.594.572.181,05
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.102.741.654.557,03	2.712.983.043.505,37
Aset Tetap Lainnya	66.211.639.674,52	54.751.557.362,38
Konstruksi dalam pengerjaan	58.754.138.648,67	44.634.076.501,67
Akumulasi Penyusutan	(328.093.840.161,43)	(279.870.841.917,74)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>23.353.370.510.979,30</b>	<b>22.995.114.963.711,50</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	26.730.618.522,91	26.730.618.522,91
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	19.446.556.942,00	20.260.110.901,50
Tagihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Aset Lain-lain	103.911.956.927,17	80.557.231.943,46
Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran	0,00	390.000.000,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>150.089.132.392,08</b>	<b>127.937.961.367,87</b>
<b>JUMAH ASET</b>	<b>25.415.405.110.774,30</b>	<b>24.793.716.376.864,60</b>

### Lanjutan Tabel IV-2 Neraca

<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Bank	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Obligasi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Utang Pemerintah Pusat	3.243.483.068,86	22.531.284.350,15
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah Kabupaten/	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.287.157.402,50	2.385.490.735,87
Utang Jangka Pendek Lainnya	24.391.739.546,86	33.176.235.497,26
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Belanja	44.578.912.953,00	171.838.796.786,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>74.501.292.971,22</b>	<b>229.931.807.369,28</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00
Utang Pemerintah Pusat	95.982.470.897,87	99.021.381.077,86
Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Utang Luar Negeri -Sektor Perbankan	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>95.982.470.897,87</b>	<b>99.021.381.077,86</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>170.483.763.869,09</b>	<b>328.953.188.447,14</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	370.720.769.951,55	73.033.060.944,24
Cadangan Untuk Piutang	1.156.537.038.135,80	1.274.386.378.590,72
Cadangan Untuk Persediaan	62.212.467.421,16	47.748.112.714,85
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(74.501.292.971,22)	(229.931.807.369,28)
Pendapatan yang Ditangguhkan	52.495.438,90	255.934.075,48
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>1.515.021.477.976,19</b>	<b>1.165.491.678.956,01</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	322.422.696.455,53	275.239.965.460,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	23.353.370.510.979,30	22.995.114.963.711,50
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk dana cadangan)	150.089.132.392,08	127.937.961.367,87
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	(95.982.470.897,87)	(99.021.381.077,86)
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>23.729.899.868.929,10</b>	<b>23.299.271.509.461,50</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>25.244.921.346.905,20</b>	<b>24.464.763.188.417,50</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>25.415.405.110.774,30</b>	<b>24.793.716.376.864,60</b>

### 3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam



Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Adapun Laporan Arus Kas (LAK) yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 dan 2013 yaitu :

**Tabel IV-3 Laporan Arus Kas**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	2014	2013
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	962.728.267.172,53	881.346.719.012,01
Pendapatan Retribusi Daerah	171.006.302.216,00	188.459.795.126,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yag Dipisahkan	5.705.018.825,00	9.503.605.764,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.806.526.516,09	126.859.589.245,22
Dana Bagi Hasil Pajak	146.798.093.693,00	172.440.053.470,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.228.646.238,00	1.614.584.116,00
Dana Alokasi Umum	1.393.504.580.000,00	1.270.244.794.000,00
Dana Alokasi Khusus	55.582.193.000,00	62.016.918.000,00
Dana Penyesuaian	364.744.140.000,00	363.758.805.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	694.490.156.447,00	190.770.621.426,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	521.904.124,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	9.328.800.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.042.115.828.231,62	3.276.344.285.159,73
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	2.049.029.168.377,00	1.912.221.528.149,00
Belanja Barang	851.348.898.697,83	644.025.941.486,33
Belanja Bunga	1.424.780.450,14	4.993.144.103,55
Belanja Hibah	35.738.893.607,00	29.935.455.125,00
Belanja Bantuan Sosial	533.736.000,00	742.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.166.137.982,00	1.166.264.900,00
Belanja Tak Terduga	518.506.250,00	561.255.860,00
Jumlah Arus Kas Keluar	2.939.760.121.363,97	2.593.646.089.623,88
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.102.355.706.867,65</b>	<b>682.698.195.535,85</b>

### Lanjutan Tabel IV-3 Laporan Arus Kas

<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	43.171.269.654,00	8.494.139.667,00
Belanja Peralatan dan Mesin	115.107.207.872,63	99.416.886.349,00
Belanja Bangunan dan Gedung	158.665.997.192,00	207.509.235.619,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	458.153.424.264,00	312.285.027.580,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.785.278.739,00	3.097.669.570,00
Jumlah Arus Kas Keluar	783.883.177.721,63	630.802.958.785,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(783.883.177.721,63)</b>	<b>(630.802.958.785,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	11.334.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	11.334.000.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Utang	20.784.820.138,71	12.701.122.846,29
Jumlah Arus Kas Keluar	20.784.820.138,71	12.701.122.846,29
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(20.784.820.138,71)</b>	<b>(1.367.122.846,29)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	303.730.315.135,00	270.345.450.701,00
Saldo Kas di Bendahara Swadana TA 20X0	12.711.215.458,89	0,00
Saldo Kas di Bendahara Swakelola TA 20X0	1.313.728.910,22	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	317.755.259.504,11	270.345.450.701,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	303.730.315.135,00	270.345.450.701,00
Saldo Kas di Bendahara Swadana TA 20X1	47.916.274.663,14	0,00
Saldo Kas di Bendahara Swakelola TA 20X1	521.159,94	0,00
Koreksi SILPA	0,00	3.296.762,00
Jumlah Arus Kas Keluar	351.647.110.958,08	270.345.450.701,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>(33.891.851.453,97)</b>	<b>(3.296.762,00)</b>
<b>Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>263.795.857.553,34</b>	<b>50.524.817.142,56</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>59.008.116.575,13</b>	<b>8.483.299.432,57</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>322.803.974.128,47</b>	<b>59.008.116.575,13</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>52.495.438,90</b>	<b>255.934.075,48</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas di Bendahara Swadana</b>	<b>39.950.991.297,14</b>	<b>12.711.215.458,89</b>
<b>Kas di Bendahara Swakelola</b>	<b>521.159,94</b>	<b>1.313.728.910,22</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>362.807.982.024,45</b>	<b>73.288.995.019,72</b>

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam CaLK menyajikan penjelasan naratif pada setiap pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LAK yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan salah satu laporan optional yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 6. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)

Laporan Kinerja Keuangan hanya terdapat dalam CTA. Dimana laporannya bersifat optional yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos seperti sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas serta koreksi kesalahan yang mendasar.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap entitas menggunakan *Accrual basis*, maka Pemerintah Kota Medan sudah menggunakan *Accrual basis* dalam penyajian laporan keuangannya sejak tahun 2015. Walaupun dalam pelaksanaannya sedikit rumit dan kompleks, namun kelebihan dari *Accrual basis* adalah terletak dari pengakuan setiap transaksi yang diakui pada saat transaksi itu terjadi tanpa harus memperhatikan kas. *Accrual basis* secara umum menyajikan seluruh sumber daya termasuk aset dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh CTA. Pada *Accrual basis*, Pemerintah Kota Medan menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut disajikan masing-masing laporan keuangan yaitu :

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017 dan 2016 yaitu :

**Tabel IV-4 Laporan Realisasi Anggaran**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50	79,82	4.308.116.916.024,91
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	2.031.995.548.717,81	1.739.756.922.633,50	85,62	1.535.309.574.014,91
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.387.127.546.952,00	1.370.149.681.442,32	98,78	1.125.638.762.947,32
Peendapatan Retribusi Daerah - LRA	255.573.650.000,00	113.452.533.261,00	44,39	115.597.958.126,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	12.181.227.000,00	11.095.561.295,00	91,09	8.948.679.468,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	377.113.124.765,81	245.059.146.635,18	64,98	285.124.173.473,59
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	3.491.627.568.702,00	2.669.308.559.567,00	76,45	2.772.807.342.010,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.236.515.051.000,00	2.122.769.416.793,00	94,91	1.900.853.852.448,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	257.310.464.000,00	198.592.781.675,00	77,18	222.056.416.659,00
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LRA	2.081.721.000,00	728.354.995,00	34,99	2.215.876.789,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.611.940.995.000,00	1.583.624.375.000,00	98,24	1.611.940.995.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	365.181.871.000,00	339.823.905.123,00	93,06	64.640.564.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya- LRA	0,00	0,00	0,00	336.747.526.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	0,00	0,00	0,00	336.747.526.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.155.077.217.702,00	546.539.142.774,00	47,32	535.205.963.562,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.154.798.738.307,00	546.260.663.379,00	47,30	535.205.963.562,00
Pendapatan Bagi Hasil Retribusi - LRA	278.479.395,00	278.479.395,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan - LRA	100.035.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya- LRA	100.035.300.000,00	0,00	0,00	0,00

### Lanjutan Tabel IV-4 Laporan Realisasi Anggaran

<b>BELANJA</b>	5.546.733.964.019,40	4.394.045.824.264,53	79,22	4.523.672.134.655,15
<b>BELANJA OPERASI</b>	4.119.300.403.261,40	3.396.569.832.362,53	82,46	3.584.201.617.240,59
Belanja Pegawai	1.845.232.629.924,40	1.682.781.733.166,00	91,20	1.931.524.035.078,00
Belanja Barang Dan Jasa	2.206.266.989.337,00	1.657.745.767.146,53	75,14	1.611.295.271.244,59
Belanja Hibah	60.000.000.000,00	55.317.675.150,00	92,20	40.988.310.918,00
Belanja Bantuan Sosial	7.800.784.000,00	724.656.900,00	9,29	394.000.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	1.411.306.657.578,00	997.475.991.902,00	70,68	936.599.131.961,06
Belanja Modal Tanah	123.861.070.001,00	66.525.256.216,00	53,71	40.930.175.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.867.433.668,00	133.047.008.057,00	65,58	187.784.016.635,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.054.051.225,00	58.403.395.809,00	39,72	96.818.457.515,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	925.144.505.938,00	733.321.157.013,00	79,27	566.401.311.764,06
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.379.596.746,00	6.179.174.807,00	49,91	44.665.170.447,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	16.126.903.180,00	0,00	0,00	2.871.385.453,50
Belanja Tak Terduga	16.126.903.180,00	0,00	0,00	2.871.385.453,50
<b>TRANSFER</b>	7.350.344.960,00	1.799.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	7.350.344.960,00	1.799.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.350.344.960,00	1.799.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(30.461.191.559,59)	13.240.312.975,97	(43,47)	(217.114.414.970,24)
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	35.461.191.559,59	35.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
Pengguna Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	35.461.191.559,59	35.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	30.461.191.559,59	30.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	43.701.504.535,76	0,00	35.461.191.559,79

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga terjadi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Laporan SAL hanya terdapat dalam *Accrual basis* dan hanya digunakan oleh unit yang memiliki fungsi pembendaharaan.

Adapun Laporan Perubahan SAL yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017 dan 2016 yaitu :

**Tabel IV-5 Laporan Perubahan SAL**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  
2017 DAN 2016

URAIAN	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	35.461.191.559,79	252.575.606.530,03
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	35.461.191.559,79	252.575.606.530,03
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	43.701.504.535,76	35.461.191.559,79
<b>Sub Total</b>	43.701.504.535,76	35.461.191.559,79
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	43.701.504.535,76	35.461.191.559,79

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Adapun Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017 yaitu :

Tabel IV- 6 Neraca

NERACA  
PEMERINTAH KOTA MEDAN  
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	2017	2016
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	43.535.931.704,86	35.400.941.789,60
Kas di Bendahara Penerimaan	79.986.000,00	20.473.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	78.557.211,00	0,00
Kas di BLUD	101.562.855,90	60.249.770,19
Kas di Lainnya	31.531.000,00	367.309.065,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas di BOS	364.203.356,01	2.447.409.738,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	756.306.431.257,51	815.930.904.134,26
Piutang Lainnya	9.257.160.840,11	5.516.628.592,36
Penyisihan Piutang	(208.764.488.668,27)	(147.961.416.548,11)
Beban Dibayar Dimuka	571.791.666,66	890.500.000,00
Persediaan	98.074.400.535,91	84.050.887.906,11
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>699.655.067.759,69</b>	<b>796.723.887.947,41</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	331.600.938.315,53	324.308.344.048,53
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	331.600.938.315,53	324.308.344.048,53
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>331.600.938.315,53</b>	<b>324.308.344.048,53</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	23.225.350.253.680,50	23.414.110.751.880,50
Peralatan dan Mesin	1.326.107.112.169,01	1.258.951.595.156,57
Gedung dan Bangunan	1.265.392.014.951,51	1.403.482.876.864,70
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.008.132.867.460,50	4.236.645.318.379,69
Aset Tetap Lainnya	80.457.690.070,67	94.040.358.192,90
Konstruksi dalam pengerjaan	23.618.681.018,67	91.835.101.867,67
Akumulasi Penyusutan	(2.718.078.363.934,80)	(2.192.629.323.304,71)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>28.210.980.255.416,00</b>	<b>28.306.436.679.037,30</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Lanjutan IV-6 Neraca

<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	338.550.426.659,52	338.550.426.659,52
Aset Tidak Berwujud	12.405.862.746,34	11.949.040.807,47
Aset Lain-lain	917.464.630.591,72	162.370.349.797,27
Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	17.115.954.539,40	18.344.944.713,60
Tagihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1.285.536.874.536,99</b>	<b>531.214.761.977,86</b>
<b>JUMAH ASET</b>	<b>30.527.773.136.028,20</b>	<b>29.958.683.673.011,10</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14.547.236,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	204.382.725,00
Pendapatan Diterima Dimuka	9.704.279.685,51	7.643.628.145,31
Utang Beban	143.019.365.064,71	95.670.705.964,24
Utang Jangka Pendek Lainnya	100.225.877.606,00	56.278.423.982,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>252.964.069.592,22</b>	<b>159.797.140.816,55</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	95.164.939.997,87
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>95.164.939.997,87</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>252.964.069.592,22</b>	<b>254.962.080.814,42</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	30.274.809.066.436,00	29.703.721.592.196,60
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>30.527.773.136.028,20</b>	<b>29.958.683.673.011,10</b>

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional hanya terdapat dalam penggunaan *Accrual basis*.



Adapun Laporan Operasional (LO) yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017 dan 2016 yaitu :

**Tabel IV-7 Laporan Operasional**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>PENDAPATAN-LO</b>	4.499.130.936.884,46	4.549.927.463.388,45	(50.796.526.503,98)	(1,12)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.886.811.885.631,46	1.612.076.639.560,46	274.735.246.071,01	17,04
Pendapatan Pajak Daerah-LO	1.506.976.945.145,16	1.202.629.810.253,59	304.347.134.891,57	25,31
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	114.641.753.564,00	117.546.053.834,00	(2.904.300.270,00)	(2,47)
Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-L	13.568.498.170,00	8.348.487.687,50	5.220.010.482,50	62,53
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	251.624.688.752,30	283.552.287.785,37	(31.927.599.033,07)	(11,26)
<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	2.463.590.347.588,00	2.713.856.757.386,00	(250.266.409.797,99)	(9,22)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.122.769.416.793,00	1.900.853.852.448,00	221.915.564.345,00	11,67
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	0,00	336.747.526.000,00	(336.747.526.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	340.820.930.795,00	476.255.378.938,00	(135.434.448.142,99)	(28,44)
Bantuan Keuangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	148.728.703.665,00	223.994.066.442,00	(75.265.362.777,00)	(33,60)
Pendapatan Hibah-LO	148.728.703.665,00	223.994.066.442,00	(75.265.362.777,00)	(33,60)
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEBAN</b>	4.041.642.643.396,00	4.312.455.070.063,77	(270.812.426.667,77)	(6,28)
<b>BEBAN OPERASI</b>	4.039.863.298.436,00	4.308.024.488.270,27	(268.161.189.834,27)	(6,22)
Beban Pegawai-LO	1.698.820.461.816,00	1.928.418.504.575,00	(229.598.042.759,00)	(11,91)
Beban Persediaan	432.875.983.478,90	469.706.893.979,83	(36.830.910.500,93)	(7,84)
Beban Jasa	1.148.025.126.714,48	1.198.009.732.153,25	(49.984.605.438,77)	(4,17)
Beban Pemeliharaan	63.164.261.681,63	63.505.113.870,54	(340.852.188,91)	(0,54)
Beban perjalanan Dinas	126.082.652.090,00	91.747.697.698,00	34.334.954.392,00	37,42
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	55.353.715.150,00	40.988.310.918,00	14.365.404.232,99	35,05
Beban Bantuan Sosial	724.656.900,00	394.000.000,00	330.656.900,00	83,92
Beban Penyusutan dan Amortisasi	418.172.952.828,91	405.271.657.763,62	12.901.295.065,29	3,18
Beban Penyisihan Piutang	56.512.658.948,80	63.100.019.584,81	(6.587.360.636,01)	(10,44)
Beban Lain-lain	40.130.828.827,28	46.882.557.727,22	(6.751.728.899,94)	(14,40)
<b>BEBAN TRANSFER</b>	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00	220.148.620,00	14,12
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00	220.148.620,00	14,12
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	0,00	2.871.385.453,50	(2.871.385.453,50)	(100,00)
Beban Luar Biasa	0,00	2.871.385.453,50	(2.871.385.453,50)	(100,00)
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	457.488.293.488,46	237.472.393.324,67	220.015.900.163,79	92,65
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	914.976.586.976,93	477.816.172.102,84	437.160.414.874,08	91,49

## 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Adapun Laporan Arus Kas (LAK) yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017 dan 2016 yaitu :

**Tabel IV-8 Laporan Arus Kas**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	2017	2016
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	1.370.149.681.442,32	1.125.638.762.947,32
Pendapatan Retribusi Daerah	113.452.533.261,00	115.597.958.126,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yag Dipisahkan	11.095.561.295,00	8.948.679.468,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.239.109.501,47	144.361.423.252,49
Dana Bagi Hasil Pajak	198.592.781.675,00	222.056.416.659,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	728.354.995,00	2.215.876.789,00
Dana Alokasi Umum	1.583.624.375.000,00	1.611.940.995.000,00
Dana Alokasi Khusus	339.823.905.123,00	64.640.564.000,00
Dana Penyesuaian	0,00	336.747.526.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	546.260.663.379,00	535.205.963.562,00
Pendapatan Lainnya	278.479.395,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.292.245.445.066,79	4.167.354.165.803,81

### Lanjutan Tabel IV-8 Laporan Arus Kas

Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	2.167.390.826.729,00	2.441.393.474.914,00
Belanja Barang	1.056.993.775.905,53	937.718.466.684,20
Belanja Hibah	55.317.675.150,00	40.988.310.918,00
Belanja Bantuan Sosial	724.656.900,00	394.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00
Belanja Tak Terduga	0,00	2.871.385.453,50
Jumlah Arus Kas Keluar	3.282.206.279.644,53	324.924.834.309,70
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.010.039.165.422,26</b>	<b>742.429.331.494,11</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	66.525.256.216,00	40.930.175.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	132.425.240.887,00	187.021.825.144,00
Belanja Bangunan dan Gedung	58.403.395.809,00	96.818.457.515,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	733.321.157.013,00	566.401.311.764,06
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.165.115.607,00	44.665.170.447,00
Jumlah Arus Kas Keluar	996.840.165.532,00	935.836.940.470,06
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(996.840.165.532,00)</b>	<b>(935.836.940.470,06)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.000.000.000,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	310.689.787.919,00	347.072.737.712,00
Saldo Sisa UP TA 20X0	0,00	125.771.780,00
Jumlah Arus Kas Masuk	310.689.787.919,00	347.198.509.492,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	310.689.787.919,00	347.072.737.712,00
Saldo Sisa UP TA 20X1	128.019.950,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	310.817.807.869,00	347.072.737.712,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(128.019.950,00)</b>	<b>125.771.780,00</b>
<b>Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>8.070.979.940,26</b>	<b>(193.281.837.195,95)</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>35.400.941.789,60</b>	<b>228.682.778.985,55</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>43.471.921.729,86</b>	<b>35.400.941.789,60</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>79.986.000,00</b>	<b>20.473.500,00</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>78.557.211,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas di BLUD</b>	<b>101.562.855,90</b>	<b>60.249.770,19</b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>31.531.000,00</b>	<b>367.309.065,00</b>
<b>Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas di BOS</b>	<b>364.203.356,01</b>	<b>2.447.409.738,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>44.127.762.152,77</b>	<b>38.296.383.862,79</b>

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2017 dan 2016 yaitu :

**Tabel IV-9 Laporan Perubahan Ekuitas**

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER  
2017 DAN 2016

URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	29.703.721.592.196,70	29.704.909.866.915,30
SURPLUS/DEFISIT-LO	457.488.293.488,46	237.472.393.324,67
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	113.599.180.750,87	(238.660.668.043,31)
Ekuitas Antara SKPD	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	30.274.809.066.436,00	29.703.721.592.196,70

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam CaLK menyajikan penjelasan naratif dalam setiap pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dikatakan sebagai penjelasan dari setiap laporan keuangan yang ada.

## B. Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas yang akan menjawab rumusan masalah tentang penyajian laporan keuangan yang menggunakan *Cash Toward Accrual* (CTA) dengan *Accrual basis*. Laporan keuangan Pemerintah Kota Medan yang menggunakan CTA hanya menyajikan 6 (enam) komponen laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang menggunakan *Accrual basis* menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan. Adapun bentuk penyajian dengan menggunakan CTA dan *Accrual basis* dalam laporan keuangan pemerintah Kota Medan yaitu :

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran, baik dengan basis CTA maupun *Accrual basis* pada prinsipnya tidak ada yang berbeda. Dimana pengakuan pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Dan pengakuan belanja/beban diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pemerintah Kota Medan menyajikan LRA dengan *cash basis* sesuai ketentuan dari peraturan menteri dalam negeri yang mengaturnya walaupun sebenarnya didalam Standar Akuntansi Pemerintahan juga diperbolehkan menyajikan LRA dalam *Accrual basis* dengan mengakui pendapatan dan belanja/beban pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan belanja/beban tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

## 2. Neraca

Dalam laporan Neraca terdapat perbedaan antara CTA dengan *Accrual basis* dalam pos ekuitas dana. Dimana dalam CTA, ekuitas terbagi atas 3 (tiga) yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada *Accrual basis*, ekuitas hanya 1 (satu), yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Dalam segi pengakuan, CTA dan *Accrual basis* dalam laporan Neraca adalah sama. Dimana aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah. Selain itu, kewajiban juga diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat dikur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

### 3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Dimana dalam Pemerintah Kota Medan dapat juga dikatakan sebagai unit yang memiliki bendahara umum daerah sehingga menyajikan Laporan Arus Kas dalam pelaporannya. Dalam CTA, arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Sedangkan dalam *Accrual basis* diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Dalam *Cash Toward Accrual* (CTA), laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang bersifat optional yang menyajikan pos-pos berupa sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-satndar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Sedangkan dalam *Accrual basis*, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos berupa ekuitas awal, surplus/defisit-LO

pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

Dari uraian diatas dapat dilihat beberapa perbedaan pengakuan dari komponen laporan keuangan terutama pada LRA dan Neraca. Disamping dari segi pengakuan, perbandingan lainnya dapat dilihat dari segi pencatatan. Dimana Neraca dan laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan-laporan yang saling berhubungan, dikarenakan pada LRA menyajikan laporan keuangan dengan *cash basis*, sedangkan neraca menyajikan laporan keuangan dengan *Accrual basis*. Maka dari itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, dibutuhkan jurnal korolari dalam teknis pencatatannya. Jurnal korolari hanya digunakan pada saat Pemerintah menerapkan *Cash Toward Accrual (CTA)*. Jurnal korolari diperlukan dalam akuntansi pemerintahan karena pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Jurnal korolari ditekankan dalam belanja modal yang terlebih dahulu dicatat sebagai realisasi belanja modal yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan untuk mencatat bertambahnya aset akibat adanya belanja modal tersebut dicatat dengan menggunakan jurnal kedua atau yang disebut jurnal korolari.

Pencatatan jurnal korolari belanja modal berdasarkan transaksi yang dicatat oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu pada Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut “Pembayaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP Tahun Anggaran 2013 (Pengadaan Pendidikan IPS



SMP) ”. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam LRA dengan basis kas, maka transaksi pertama kali yang dicatat adalah :

**Tabel IV-10 Jurnal Umum**

Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	27.911.000
R/K Pusat	27.911.000

Belanja alat peraga/praktik sekolah merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam LRA, sedangkan kas merupakan akun riil yang akan disajikan dalam neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagian aktiva neraca. Padahal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrual atau mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Maka dari itu dibuat jurnal lain (korolari) yang terkait dengan neraca atas transaksi tersebut dilakukan dengan pencatatan sebagai berikut :

**Tabel IV-11 Jurnal Korolari**

Kendaraan	100.000.000
Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap	100.000.000

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup dominan antara penerapan *Cash Toward Accrual (CTA)* dengan *Accrual basis*. Perbedaan keduanya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-12 Perbedaan CTA dengan Accrual basis

Keterangan	Cash Toward Accrual (CTA)	Accrual basis
Basis Akuntansi	<p><b>Basis kas</b> untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA</p> <p><b>Basis akrual</b> untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.</p>	<p><b>Basis akrual</b> untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.</p> <p>Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar <b>basis kas</b>, maka LRA disusun berdasarkan <b>basis kas</b>. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan <b>basis akrual</b>, maka LRA disusun berdasarkan <b>basis akrual</b>.</p>
Komponen Laporan Keuangan	<p>Laporan Pokok :</p> <p style="text-align: center;">LRA Neraca LAK CaLK</p> <p>Laporan Optional :</p> <p style="text-align: center;">LKK LPE</p>	<p>Laporan Pokok :</p> <p style="text-align: center;">LRA Laporan Perubahan SAL Neraca LAK LPE LO CaLK</p>

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis dan didukung oleh data yang didapatkan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Medan dalam penerapan *Cash Toward Accrual* (CTA) menyajikan 6 (enam) komponen laporan keuangan yang telah diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu diantaranya adalah Laporan pokok terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan laporan optional terdiri dari Laporan Kinerja Karyawan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penerapan CTA yang dilakukan sampai dengan tahun 2014 sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pemerintah Kota Medan dalam penerapan *Accrual basis* menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan pokok yang telah diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penerapan *Accrual basis* yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Kedua basis tersebut, yaitu CTA dengan *Accrual basis* terdapat perbedaan yang dominan. Pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan yang menggunakan CTA, terdapat Laporan Kinerja Keuangan yang tidak terdapat dalam *Accrual basis*. Sebaliknya, pada *Accrual basis* juga memiliki Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Operasional (LO) yang tidak disajikan dalam Laporan dengan menggunakan CTA. Dimana *Accrual basis* lebih komprehensif dan relevan dalam penyajian laporan keuangan secara keseluruhan dan bukan hanya berfokus kepada kas saja melainkan seluruh sumber daya pada saat peristiwa/transaksi terjadi. Perbedaan lainnya yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Dimana dalam penyajian laporan keuangannya yaitu LRA masih menggunakan *cash basis*, sedangkan dalam Neraca sudah menggunakan *Accrual basis*.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, adapun saran yang diberikan peneliti, antara lain :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih mantap dalam pemahaman penerapan *Accrual basis* untuk dipersiapkan dalam penerapannya yang lebih lanjut.
2. Untuk penerapan laporan keuangan *Accrual basis* ini, maka sebaiknya SDM yang menanganinya perlu dibuat pelatihan internal. SDM yang berkualitas akan membantu penerapan sistem akuntansi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antin Oktifitasari (2014) “Implementasi SAP Berbasis Akruwal dalam penyajian akuntansi aset tetap daerah”. *Perspektif Opin BPK. Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 14 No. 2. Solo.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baries Ferryono dan Sutaryo (2017), “Manfaat Akuntansi Basis Akruwal dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akruwal dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 4. No. 1. Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Binsar Simanjuntak (2005). “Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 1 No.1, Mei 2005.
- Eka, Heny, dan Yuswar (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Medan : Suatu Pengantar*.
- Eliada, Sukirman, Fairuz (2017). “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akruwal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1. Purwokerto.
- International Federation of Accountants (IFAC) (2003). *Study 14, Transition to the accrual basis of accounting: guidance for governments and government entities (second edition)*.
- Karindiya Widhanti (2015). “Analisis akuntansi berbasis akruwal pada SKPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bnayuwangi”. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal*.
- Khan, A., & Mayes, S. (2009). *Transition to accrual accounting*. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department
- Laughlin, R. (2012). *Debate: accrual accounting: information for accountability or decision*.
- Lili Indrawati (2018) “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruwal pada satuan kerja politeknik Bandung”. *Jurnal Akuntansi*. Vol 10. No. 1. Mei, 2018.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Cah Toward Accrual*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Republik Indonesia (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Ririz Setiawati Kusuma (2013). "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual". Skripsi diterbitkan. Jember: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Rosalia (2017). "Implementasi Pelaporan Keuangan berbasis akrual pada perguruan tinggi negeri badan hukum". UNDIP Semarang.
- Sari Zawitri (2015). "Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 4. No. 1, Pontianak.
- Septia (2013). "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Badan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya". *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, Fakultas Ekonomi UNTAN, Vol. 2, No. 3.
- Siti, ed Aliyah (2012). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 8. No. 2, Mei 2012.
- Thomas H. Beechy (2007). "Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability The Innovation Journal". *The Public Sector Innovation Journal*. Vol. 12. No. 3, 2007.
- Tudor, A., T., & Mutiu, A. (2006). Cash versus accrual accounting in public sector. Faculty of Economics and Business Administration, Babes Bolyai University.